

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Mukhammad<sup>1</sup>, Fatoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia  
Email : [mukhammadmukhamad217@gmail.com](mailto:mukhammadmukhamad217@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam, Indonesia  
Email : [fatonikhadis0504@gmail.com](mailto:fatonikhadis0504@gmail.com)

### Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau penulisan artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang sebelumnya yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mereview kembali tentang analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis guna untuk riset selanjutnya agar lebih berkembang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran empirik tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah, dan implementasi pendidikan dasar dan menengah.

**Kata kunci:** *analisis kebijakan pendidikan, konsep dasar kebijakan pendidikan dasar dan menengah, implementasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah*

### Abstract

Previous research or relevant research is very important in research or writing scientific articles. Previous research or relevant previous research serves to strengthen theories and phenomena of the relationship or influence between variables. This article reviews the policy analysis of primary and secondary education. The purpose of writing this article is to build a hypothesis for further development. The problem in this research is the empirical picture of primary and secondary education policies, and the implementation of primary and secondary education.

**Keywords:** *education policy analysis, basic concepts of primary and secondary education policy, implementation of primary and secondary education policy*

### PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di tempat lembaga pendidikan itu ada. (Imron 1995)

Di Indonesia, yang merupakan negara hukum juga menitik beratkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negaranya. Bagaimana tidak? Kebijakan demi kebijakan dibongkar pasang untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan. Dimulai dari kebijakan pengalokasian 20% APBN untuk anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih belum 100% terlaksana, hingga kurikulum yang berubah-ubah. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan pendidikan sering menimbulkan pertanyaan dan kontroversi di masyarakat dan dunia pendidikan. (Nugroho 2008)

Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya belajar untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan internal maupun isu-isu pendidikan dalam lintas sektoral. Pendidikan merupakan tolak ukur sebuah negara atau bangsa yang maju, pendidikan juga menjadi hal yang sangat fatal terkait kelangsungan sebuah negara dalam menyelesaikan berbagai problem kenegaraan baik di bidang ekonomi, budaya, kesehatan,

agama dsb. Pendidikan merupakan sebuah alat utama demi tercapainya tujuan sebuah negara karena muara dari semua kebutuhan negara harus berdasarkan pengetahuan yang memadai. Di era milenial ini banyak hal penyimpangan merasuki anak – anak penerus generasi bangsa baik itu narkoba, pelecehan seksual, LGBT, karakter buruk dsb sangat sedikit sekali yang produktif. Salah satu dampak dari belajar sekedar tau tapi tidak di praktekkan dalam kehidupan nyata. Warga negara Indoensia aktif sebagai konsumtif dari tren masa kini dari benua Eropa dan America namun tidak produktif, Indonesia yang merupakan negara berkembang saat ini menjadi sorotan dunia dengan kekakyaan alam yang melimpah dan populasi penduduk ke 4 dunia namun sumberdaya manusia yang lemah sehingga membuka ruang kepada perusahaan luar negeri untuk memasarkan barang di Indonesia.(Rahardjo 2010)

Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumberdaya alamnya agar mampu mengolah sumberdaya alamnya sendiri. Survei membuktikan bahwa pendidikan di beberapa negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pendidikan lebih sering dikemas dalam balutan politik secara tidak benar, hal ini menyebabkan tumbuhnya situasi yang tidak seimbang dan tidak konsisten antara relasi sesama birokrat, politisi dan masyarakat yang mengakibatkan kesuraman dan ketidak jelasan kebijakan pendidikan di Indonesia.(Jalal and Supriadi 2001)

Pemimpin merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengeluarkan sebuah regulasi namun tidak semuanya pemangku kebijakan berani mengambil keputusan lompat pagar mengingat banyak kepentingannya masing - masing yang syarat dengan politik. Ditahun 4.0 dituntut untuk melakukan terobosan yang tidak terfikirkan oleh kebanyakan orang dan berani dalam melawan kepentingan politik demi terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Di tahun 2019 Nadiem Makariem yang merupakan CEO Gojek Menjadi Menteri Pendidikan, dengan latar belakang bukan didunia pendidikan yang bernafas ekonomi kreatif yang banyak para pakar tidak menyangka, namun kebijakan beliau membuat orang tercengang karena berani dalam membuat keputusan yang berbasis kepada penyelesaian masalah bukan pada keperpihakan pada elit politik, adapun respon stakeholder tentu pro dan kontra.(Jannah 2019)

Berdasarkan pengalaman empirik di atas banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian yang terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan sangat di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan antar variabel dan membangun hipotesis yang sangat diperlukan pada pembahasan hasil penelitian. Artikel ini mereview kembali analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah.

## METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*libary research*). Mengkaji teori atau hubungan antar variabel dari buku-buku dan jurnal, baik secara offline dari buku diperpustakaan dan secara online yang bersumber dari mendeley, Google Scholar dan media online lainnya.(Nurhayati and Rosadi 2022)

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumendokumen dalam bentuk buku-buku, literaturliteratur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam artikel ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, display dat adan verifikasi data. (Nurhayati et al. 2022)

## HASIL

Terdapat dua hal dielaborasi dalam analisis kebijakan pendidikan terkait dengan upaya perumusan yakni, perumusan masalah kebijakan pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan. Perumusan masalah merupakan bagian dari tahap analisis kebijakan, perumusan masalah kebijakan pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik dipilih sebagai usaha untuk mencapai, kesepakatan, consensus, kompromi dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama.(PRESS 2018)

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah: 1) Memiliki tujuan pendidikan. 2) Memenuhi aspek legal-formal. 3) Memiliki konsep operasional. 4) Dibuat oleh yang berwenang. 5) Dapat dievaluasi. 6) Memiliki sistematika.(Tilaar and Nugroho 2008)

Adapun Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu; (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Sisdiknas bahwa peserta didik akan dievaluasi oleh gurunya dan kelulusan ditentukan oleh sekolah. (2) Ujian Nasional. Pada tahun 2021 mendatang Nadiem berencana akan mengganti sistem UN yang ada dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Seperti apa dan bagaimana asesmen dan survei karakter pengganti UN juga masih belum tergambar secara jelas. Yang jelas, UN 2020 adalah ujian nasional terakhir yang diselenggarakan pemerintah. (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ke depan, RPP tak lagi berlembar-lembar sebagaimana biasanya. Oleh Nadiem, RPP akan diringkas menjadi satu lembar saja. Ia ingin memangkas administrasi yang selama ini membebani para guru. (4) Sistem zonasi PPDB. Sistem zonasi akan tetap diberlakukan. Hanya saja, ia akan menambah kuota jalur prestasi. Kuota yang semula terdiri dari 80 persen zonasi, 5 persen perpindahan, dan 15 persen prestasi, diubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi itu Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, sisanya untuk prestasi 30 persen.(Jannah 2019)

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat suigeneri dan seteril dari aneka pengaruh eksternal prosesnya dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu aspirasinya di pertimbangkan oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan.(Jannah 2019)

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implementasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakann pendidikan dapat berlaku dalam praktek. Baiknya suatu rumusan kebijakan justru lebih lanjut dapat mendukung mudahnya implementasi kebijakan.(Jannah 2019)

Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara rumusan dengan aplikasi dilapangan yang apabila tidak sejalan maka tujuan idak bisa di capai sebagaimana telah di rumuskan.(Supriadi 2001)

Secara teoritik, kebijakan pendidikan dalam rangkrah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat pendekatan implementatif tersebut adalah Pertama *Struktur Approach*, merupakan sautu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara

structural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Struktur yang bersifat *herarkis* organisasi seperti ini amat relevan untuk situasi – situasi implementasi di mana kita memerlukan suatu organisasi pelaksana yang bertingkat yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang selalu berubah. Pola ini tentu lebih baik bila dibandingkan dengan suatu tim kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai atau bersifat *ad hoc* dalam menangani proyek proyek. Namun titik lemah dari pendekatan structural ini adalah, proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. (Arif and Wiyono 2010)

Bila dibandingkan dengan organisasi pelaksanaan yang bersifat *adhokrasi*. Pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti intruksi presiden (inpres) tentang pembangunan gedung-gedung sekolah dasar di Indonesia, dalam praktiknya berjalan lambat dan banyak kebocoran disetiap labisan birokrasi. Kedua *Procedural and managerial approach*, merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam rangka memberikan koreksi atas pendekatan sebelumnya yang dianggap memiliki beberapa kelemahan. Pendekatan ini dikembangkan dalam rangka mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Arif Rahman, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Solihin Abdul Wahab. (Arif and Wiyono 2010)

Dalam proses implementasi atau pengadministrasian setiap program mungkin banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik tertentu serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Berbagai pihak yang kemungkinan berpihak dalam implementasi program tertentu ialah para perencana tingkat nasional; para politisi tingkat nasional, regional dan lokal; kelompok-kelompok elite ekonomi, khususnya di tingkat lokal; kelompok-kelompok penerima program dan para pelaksana atau para birokrat pada tingkat menengah atau bawah. Aktor-aktor tersebut mungkin terlibat secara penuh ataukah tidak dalam implementasi program tertentu sedikit banyak akan ditentukan oleh muatan program dan bagaimana bentuk pengadministrasian programnya. (Arif and Wiyono 2010)

Peneliti juga menggunakan referensi yang terdapat di dalam penelitian terdahulu. Variabel tentang analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Musfah 2016), (Khaulani, Marsidin, and Subandi 2020), (Haq 2017).

## DISKUSI

### Pengertian dan faktor-faktor Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan merupakan suatu pemikiran yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak lahir dan prosedur pengetahuan dalam tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tidak mengungkapkan bahwa analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan berikut pemecahannya. (Kbbi 2016)

Sejak berdirinya badan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 1970, berbagai bentuk kegiatan penelitian, dan pengembangan pendidikan telah banyak dilakukan untuk mendukung proses pembuatan keputusan. Badan ini terus berkembang dengan pesat, khususnya dalam memberikan masukan

terhadap proses pembangunan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sejak Repelita I. Badan ini terus berperan dalam memunculkan berbagai gagasan pendidikan sehingga proses pendidikan telah melewati masa-masa yang penuh tantangan.(Alwi 2001b)

Para analisis kebijakan dalam pendidikan tidak hanya belajar untuk menguasai-teknik penelitian dan pengembangan tetapi juga teknik untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan internal maupun isu pendidikan dalam lintas sektoral. Masalah pendidikan secara internal akan mencakup sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti pendidikan dasar (berfungsi menanamkan kemampuan dasar), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan luar sekolah, serta komponen-komponen penunjang sistem pendidikan.(PRESS 2018)

Masalah pendidikan secara eksternal, yang juga sangat penting untuk terus dikaji oleh para analisis kebijakan, berkaitan dengan keterkaitan antar pendidikan dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta kehidupan sosial. Dalam hal-hal di atas suatu lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan perlu memperhatikan perhatiannya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan analisis kebijakan tidak hanya untuk menghasilkan gagasan-gagasan berdasarkan isu-isu yang realistis dan sesuai dengan zaman, tetapi yang sama pentingnya dengan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dihasilkan tersebut benar-benar terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.(PRESS 2018)

Dalam sejarahnya, badan ini terus meningkatkan kemampuannya sebagai badan pembaru sistem pendidikan nasional. Dari periode Repelita I berikutnya, perubahan fungsi ini terutama terutama dalam mempersiapkan strategi jangka menengah dan jangka panjang. Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proses pengambilan kebijakan publik telah diatur dengan baik oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah maupun kebijakan Depdikbud itu sendiri. tentang proses analisis kebijakan sebagai suatu sistem telah secara sistematis oleh Penelaah sektor Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdikbud terhadap proyek IEES (*Improve the Efficiency System Project*) pada tahun 1986.(PRESS 2018)

Penelitian tentang pengertian dan faktor-faktor analisis kebijakan pendidikan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Amal 2018), (Khaulani, Marsidin, and Subandi 2020), (Primasari, Marini, and Sumantri 2021)

## Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik

Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap. warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksplisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45.(BAB n.d.)

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, *as decision of government* sebagai bentuk pengesahan formal *as formal authorization*, sebagai program *as programme*, sebagai keluaran *as output*, sebagai hasil akhir *as outcome* dan sebagai teori atau model *as a theory* or model serta sebagai proses *as process*).(Alfirzan, Nasri, and Gistituati 2021)

Kebijakan merupakan pertimbangan akal, tentunya suatu kebijakan bukan seemata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. namun demikian akal manusia merupakan unsur manusia yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan kebijaksanaan yaitu lebih menekankan pada faktor-faktor emosional dan erasional bukan berarti suatu kebijaksanaan itu tidak mengandung unsur-unsur rasional.(Imron 1995)

Secara terminologi pengertian kebijakan atau *policy* yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Carter V. Good mengatakan bahwa kebijakan pendidikan ialah *educational policy is a judgement, derived from some system of values and some assessment of situasional factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired eduacational objectives*. Carter V Good memang melihat kebijakan sebagai suatu proses, tak terkecuali ketika melihat kebijakan pendidikannya itu suatu proses dimana pertimbangan – pertimbangan itu mesti diambil dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat lembaga. Kebijakan public (*Public Policy*) ialah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.(Langsa n.d.)

Hough memberikan kontribusi sangat berarti bagi para pengkaji kebijakan pendidikan. Kontribusi ini terutama menyangkut isu-isu konseptual dan teoretik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh bagi analisis kebijakan pendidikan. Menurutnya kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, programprogram, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan dikarenakan; (1) Dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan. (2) Senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan. (3) Merupakan program pemerintah. (4) Merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan. (5) Menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi. (6) Dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait.(Rahardjo 2010)

Kebijakan publik sebagai apa kebijakan yang dihasilkan pemerintah berupa Kebijakan Nasional yang mencakup, kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu Wewenang MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR menghasilkan dalam bentuk: UUD, TAP MPR, UU, PERPU dan kebijakan umum yang terdiri dari; Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, dan sebagainya.(Handoyo 2012)

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri antarlain dengan mengarah pada tujuan tertentu, dapat berbentuk positif dan negative, berada dalam bidang tertentu, dilakukan oleh pejabat Negara atau pemerintah dan tindakan yang direncanakan berpola dan saling terkait dari beberapa pengertian tersebut, kebijakan publik lebih merujuk kepada pengertian sebagai Keputusan Pemerintah dan juga sebagai sebuah program.(Imron 1995)

Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengaur kehidupan bersama atau kebijakan publik bukan mengatur kehidupan seseorang atau golongan. Sebagai sebuah keputusan negara, tujuan dari kebijakan publik adalah membangun tertib kehidupan publik dan kebijakan publik untuk mengembangkan tertib politik. (Imron 1995)

Oleh karena itu kebijakan publik meliputi seluruh kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah baik kebijakan kependudukan, kebijakan kesehatan, kebijakan perdagangan, kebijakan keagamaan, kebijakan perpajakan dan kebijakan pendidikan serta kebijakan lainnya

yang di tetapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan sebuah negara. Adapun yang lebih di fokuskan pada penulisan ini ialah kebijakan pendidikan. (Imron 1995)

Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Wujud dari kebijakan pendidikan ini berupa undang-undang pendidikan, intruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan sebagainya menyangkut dengan Pendidikan.(Arif and Wiyono 2010)

Efektivitas kebijakan pendidikan selama ini berjalan tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai. Salah satunya adalah sulitnya mengendalikan perilaku birokrasi pengelolaan kebijakan pendidikan, reformasi birokrasi di Indonesia yang diharapkan kurang berjalan yang disebabkan oleh tidak adanya unsur masyarakat saat kebijakan di akomodasikan menjadi sebuah program pelaksanaan segala sesuatu yang di tetapkan oleh pemerintah, sesungguhnya peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap sebuah kewajiban harus di buka peluang mengingat pelaksana besar dari sebuah kebijakan adalah masyarakat oleh sebab itu masyarakat telah banyak mengetahui bagaimana pelaksanaannya dilapangan.(Alwi 2001a)

Pada tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah, dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu. Pada tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.(Alwi 2001a)

Pada tahap implementasi, dilakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada tahap penghentian atau perubahan kebijakan, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.(Alwi 2001a)

Aspek kedua yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah konteks kebijakan. Ini harus dilakukan karena kebijakan tidak muncul dalam kehampaan, melainkan dikembangkan dalam konteks seperangkat nilai, tekanan, kendala, dan dalam pengaturan struktural tertentu. Kebijakan juga merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, kebutuhan serta aspirasi yang berkembang.(Alwi 2001a)

Aspek ketiga yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah pelaku kebijakan. Aktor kebijakan pendidikan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: para pelaku resmi dan pelaku tak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggungjawab berkenaan dengan pendidikan. Aktor tak resmi kebijakan pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan media. Dalam aktor kebijakan resmi, juga dibagi-bagi lagi tetapi mengikuti sistem pemerintahan negara yang dikaji, mulai dari pejabat senior hingga partai politik, lembaga pendidikan, lain-lain lembaga terkait pendidikan, dan antar badan pemerintah.(Alwi 2001a)

Pada aktor informal, atau tak resmi, terdapat kelompok kepentingan, partai politik, serta media massa. Kelompok kepentingan ini antara lain serikat guru, asosiasi yang mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu, asosiasi yang mewakili peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orangtua peserta didik. Berdasarkan seluruh kajian yang dilakukan, memang tidak mungkin untuk disimpulkan secara umum. Namun demikian, jelas bahwa kadang-kadang kebijakan pendidikan secara terbuka

dan hati-hati dihentikan, dimodifikasi, dihaluskan, atau diganti dengan kebijakan lain.(Alwi 2001a)

Penelitian tentang konsep dasar kebijakan pendidikan dan kebijakan publik ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Elwijaya, Mairina, and Gistituati 2021), (Bakry 2010), (Sutapa 2008).

## KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses terhadap perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk selalu kurun waktu tertentu.

1. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.
2. Aktor yang melakukan analisis kebijakan pendidikan adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga penelitian independen seperti SMERU.
3. Ruang lingkup analisis kebijakan pengumpulan data statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, pengujian sistem, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan analisis pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
4. Pendekatan analisis pendidikan yakni pendekatan deskriptif dan normatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfirzan, Aulia, Yuris Nasri, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Pendidikan Serta Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(1): 1521–29.
- Alwi, Syafaruddin. 2001a. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE.
- . 2001b. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed.1, cet. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Amal, Bakhrul Khair. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan."
- Arif, Rohman, and Teguh Wiyono. 2010. "Education Policy."
- BAB, I. "Pancasila Dan Juga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Kebudayaan Nasional Dari Bangsa Indonesia, Tetapi Tetap Mengikuti Tuntutan Dari Perubahan Zaman Yang Terus Bergerak. Mengutip Dari Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) Menyebutkan Bahwa Setiap."
- Bakry, Aminuddin. 2010. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal Medtek* 2(1): 1–13.
- Elwijaya, Fadiyah, Vivi Mairina, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Konsep Dasar Kebijakan

Pendidikan.”

- Handoyo, Eko. 2012. “Kebijakan Publik.” *Semarang: Widya Karya*.
- Haq, Muhammad Faishal. 2017. “Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(1): 26–41.
- Imron, Ali. 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk Dan Masa Depan*. Bumi Aksara.
- Jalal, Fasli, and Dedi Supriadi. 2001. “Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah.” (*No Title*).
- Jannah, C. 2019. “Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-Lompat Ala Nadiem Makarim–Muslimah News.”
- Kbbi, KBBI. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Khaulani, Fatma, Sufyarma Marsidin, and A Subandi. 2020. “Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Isi Di Sekolah Dasar.” *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2(2): 121–27.
- Langsa, PGMI FTIK IAIN. “ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.”
- Musfah, Jejen. 2016. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Prenada Media.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Nurhayati et al. 2022. “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 3(2): 594–601.
- Nurhayati, Nurhayati, and Kemas Imron Rosadi. 2022. “DETERMINASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : SISTEM PENDIDIKAN , PENGELOLAAN PENDIDIKAN , DAN TENAGA PENDIDIKAN ( LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM ).” 3(1): 451–64.
- PRESS, C V CENDEKIA. 2018. “ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.”
- Primasari, Ika Firma Ningsih Dian, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. 2021. “Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 5(3): 1479–91.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. “Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan.”
- Supriadi, Fasli Dedi. 2001. “Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Pendidikan.”
- Sutapa, Mada. 2008. “Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik.” *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY* 2: 112408.
- Tilaar, H A R, and Riant Nugroho. 2008. “Education Policy.” *Education policy Penganta As for Understanding Public Policy. Student library, Yogyakarta*.